



Otonomi Guru dalam Pusaran Kurikulum Merdeka: Analisis Kritis terhadap Kapabilitas Pendidik dalam Mengakselerasi Mutu Belajar

Diva Nadiya Putri¹, Della Oktavia^{2*}, Radiesta Rizqi Putera Harahap³

^{1,2,3}Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Pendidikan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: ¹divanadiyaa12@email.com, ²oktaviadella232@email.com, ³radiesta.rph@gmail.com

Informasi Artikel

Submitted: 17-06-2026

Accepted: 31-06-2026

Published: 15-07-2026

Keywords:

Teacher Autonomy
Merdeka Curriculum
Teaching Competence
Quality of Learning
Educational Transformation

Abstract

*This study aims to explore teacher autonomy in the implementation of the *Kurikulum Merdeka* (Independent Curriculum) and assess educators' ability to enhance the quality of student learning. The *Kurikulum Merdeka* offers teachers greater opportunities to create learning processes that are relevant, adaptive, and student-centered. However, this autonomy also presents challenges regarding teacher readiness—specifically concerning pedagogical competence, professionalism, and adaptability—when translating policy into efficient learning activities. This research employs a qualitative method, utilizing a literature review and critical analysis of various sources, educational policies, and research findings related to the implementation of the *Kurikulum Merdeka*. The findings indicate that teacher autonomy can serve as a strategic element in improving learning quality, provided it is supported by strong pedagogical skills, digital literacy, instructional creativity, and a culture of reflection and collaboration. Conversely, unequal access to training, limited resources, and administrative burdens remain obstacles to optimizing the teacher's role. Therefore, it is crucial to continuously strengthen educators' capacities through training programs, the establishment of learning communities, and flexible policy support, ensuring that teacher autonomy can be effectively realized and yield positive impacts on the overall quality of education.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebebasan guru dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka dan menilai kemampuan pengajar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Kurikulum Merdeka membuka lebih banyak peluang bagi guru untuk menciptakan proses pembelajaran yang relevan, adaptif, dan berfokus pada siswa. Namun, kebebasan ini juga membawa tantangan terkait kesiapan guru dalam hal kompetensi pedagogik, profesionalisme, dan kemampuan beradaptasi saat menerapkan kebijakan ke dalam kegiatan belajar yang efisien. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur dan analisis kritis terhadap berbagai sumber, kebijakan pendidikan, serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa otonomi guru bisa menjadi elemen strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, asalkan didukung oleh kemampuan pedagogik yang mumpuni, literasi digital, kreativitas dalam pembelajaran, dan budaya reflektif serta kolaboratif. Di sisi lain, ketidakmerataan akses terhadap pelatihan, keterbatasan sumber daya, dan beban administratif masih menjadi penghalang dalam optimalisasinya peran guru. Maka dari itu, penting untuk memperkuat kapasitas pendidik secara berkesinambungan melalui program pelatihan, pembentukan komunitas belajar, dan dukungan kebijakan yang fleksibel agar otonomi guru bisa transcenden dan berimplikasi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Kata Kunci: Kebebasan Guru, Kurikulum Merdeka, Kemampuan Pengajar, Kualitas Pembelajaran, Transformasi Pendidikan.

1. PENDAHULUAN

Sebagai entitas negara yang berbentuk republik, Indonesia mendirikan Pemerintahan Daerah dengan tujuan menciptakan sistem pemerintahan yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara transparan, efisien, dan efektif di seluruh wilayahnya. Pembagian otoritas dan tanggung jawab antara pemerintahan pusat dan daerah diatur dengan jelas dalam undang-undang, yang pada gilirannya memperkuat ikatan kerja sama yang erat dan tidak bisa dipisahkan antara kedua pihak, terutama dalam konteks pembangunan, termasuk di dalam pendidikan. Dalam kerangka sistem pendidikan nasional, tanggung jawab dikerjakan secara kolektif, dengan pemerintahan pusat membagi kewenangan kepada pemerintah daerah di level provinsi serta kabupaten/kota. Ini bertujuan agar mandat dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal

Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintahan daerah mempunyai tanggung jawab penuh dalam mengelola pendidikan di wilayah mereka masing-masing. Agar kebijakan pendidikan dan distribusi anggaran dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat berjalan dengan baik, diperlukan keselarasan program dan sinkronisasi antara tindakan pusat dan daerah.

Kebijakan baru yang dikenal sebagai Kurikulum Merdeka telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagai respons terhadap tantangan zaman dan dinamika yang bergerak cepat, dengan tujuan utama membentuk siswa yang memiliki karakter Pancasila dan dapat bersaing di tingkat global. Namun, implementasi kebijakan ini tidak akan efektif jika hanya berhenti di tingkat pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota perlu bertindak dengan merumuskan kebijakan-kebijakan pendukung, untuk memastikan semua elemen pendidikan di area mereka, terutama sekolah dan guru, dapat menerapkan kurikulum tersebut dengan baik.

Keberhasilan pelaksanaan kurikulum sangat dipengaruhi oleh mutu guru yang merupakan pelaksana utama. Seperti yang diungkapkan oleh Robbins, agen perubahan berfungsi sebagai penggerak dan bertanggung jawab dalam mengelola perubahan; dalam konteks ini, tenaga pendidik yang memegang peran vital harus siap dengan persiapan yang matang dan berkualitas. Agar guru dapat menjadi garda terdepan Kurikulum Merdeka, pemerintah daerah harus menyediakan kebijakan yang mendukung peningkatan profesionalisme bagi para pendidik.

Dukungan ini diwujudkan melalui program pengembangan dan pendanaan supaya para guru memahami dan dapat melaksanakan kurikulum baru tersebut, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang layak untuk mendukung pelaksanaannya.

Landasan hukum terkait hal ini sangat jelas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, beserta berbagai peraturan turunan lainnya, yang menggarisbawahi tanggung jawab pemerintah dalam peningkatan kualitas para pendidik. Dalam Pasal 11 Ayat 1 dinyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah berkewajiban memberikan kemudahan, layanan, dan memastikan terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh warga negara.

Selain itu, Pasal 40 Ayat 1 juga mengatur hak-hak para pendidik dan tenaga kependidikan, yang meliputi: penghasilan yang memadai dan jaminan kesejahteraan; penghargaan berdasarkan kinerja; pengembangan karier; perlindungan hukum saat menjalankan tugas, serta hak atas kekayaan intelektual; dan akses terhadap fasilitas pendidikan yang diperlukan untuk kelancaran tugas mereka.

Lebih jauh, wewenang pemerintah lokal dalam sektor pendidikan mencakup pendidikan untuk anak usia dini, pendidikan informal, pendidikan dasar, serta pendidikan menengah. Sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, ada enam area dalam urusan pendidikan yang dikelola secara terpisah, yaitu: manajemen pendidikan, penyusunan kurikulum, pelaksanaan akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, izin pendidikan, serta bahasa dan sastra. Dari enam aspek tersebut, wewenang untuk melaksanakan akreditasi sepenuhnya masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan metode campuran (mixed methods) yang mengombinasikan strategi kuantitatif dan kualitatif guna menghasilkan analisis yang komprehensif, ketat, dan holistik. Desain kuantitatif diimplementasikan melalui metode survei untuk memetakan data statistik serta mengevaluasi

tanggapan numerik responden terkait fenomena yang diteliti Pendekatan survei dipilih karena kapasitasnya dalam menyajikan deskripsi kuantitatif atas karakteristik populasi secara efisien, meskipun peneliti mengantisipasi risiko kesalahan non-response dengan mengoptimalkan prosedur pengumpulan data Melalui integrasi ini, keterbatasan data angka akan diperkuat oleh data kualitatif berbasis studi kasus untuk membedah realitas sosial yang dinamis, kompleks, dan kontekstual di lokasi penelitian. Langkah ini krusial untuk menangkap keunikan interaksi perilaku dan persepsi subjektif aktor pendidikan yang tidak dapat diakomodasi oleh statistik semata. Secara spesifik pada fase kuantitatif, penelitian ini menguji peran kesejahteraan psikologis sebagai variabel mediasi dalam memediasi pengaruh otonomi kerja terhadap kinerja guru.

Populasi dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *proportional random sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang terdiri atas tiga instrumen skala likert yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, meliputi: (1) instrumen otonomi kerja yang diadaptasi dari teori Breugh (1985) sebanyak 9 butir pernyataan ($\alpha = 0,890$); (2) instrumen kinerja guru yang dikembangkan mandiri berbasis teori Mathis dan Jackson (2011) sebanyak 18 butir pernyataan ($\alpha = 0,951$); serta (3) instrumen kesejahteraan psikologis yang diadaptasi dari model Ryff dan Singer (1997) sebanyak 23 butir pernyataan ($\alpha = 0,960$). Data kuantitatif yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif (uji mean) untuk memetakan kondisi makro setiap variabel, serta analisis verifikatif melalui regresi linear berganda. Pengaruh mediasi dihitung berdasarkan perkalian koefisien ($a \times b$), di mana tingkat signifikansi efek tidak langsung tersebut diuji secara matematis menggunakan Sobel test. Sementara itu, fase kualitatif diarahkan untuk mengeksplorasi pemahaman, pengalaman konkret, serta makna subjektif guru, khususnya terkait implementasi Kurikulum Merdeka dan fenomena paradoks kepemimpinan di lingkungan madrasah. Melalui pendekatan studi kasus, peneliti membedah secara mendalam manifestasi gaya kepemimpinan demokratis dan otokratis serta dampaknya terhadap inisiatif mandiri guru dalam keseharian organisasi. Penggunaan desain kualitatif ini sejalan dengan pandangan Moleong (2000) yang menegaskan bahwa pendekatan ini sangat relevan untuk mengurai problematika sosial yang rumit sekaligus mengeksplorasi sudut pandang individu secara mendalam. Guna memperkuat validitas teoretis dan memperkaya konteks pembahasan, penelitian ini juga mengadopsi metode *Systematic Literature Review* (SLR). Pendekatan SLR digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis secara komprehensif seluruh hasil riset terdahulu yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Melalui prosedur yang terstruktur dan sistematis, peneliti menghimpun serta mengintegrasikan data literatur sekunder dari berbagai sumber bereputasi, termasuk jurnal ilmiah, buku teks, dokumen resmi, dan referensi digital berbasis internet, sehingga memberikan landasan argumentasi yang kuat dalam mendiskusikan temuan lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implikasi Penerapan Kurikulum Merdeka Terhadap Kemerdekaan Guru dalam Mengajar

Dinamika dan Dialektika Pelaksanaan Pembelajaran Proses belajar mengajar menjadi faktor kunci dan pusat keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka dalam institusi pendidikan dasar. Ciri khas Kurikulum Merdeka, yang mengharuskan adanya fleksibilitas dan personalisasi dalam pencapaian hasil belajar yang kontekstual, menjadikan kelas sebagai arena bagi kebijakan yang selalu berubah. Namun, wawasan empiris dari observasi menunjukkan bahwa para guru di lapangan masih berhadapan dengan berbagai rintangan yang bersifat sistemik selama periode transisi kurikulum ini. Keberadaan rintangan tersebut secara signifikan mempengaruhi tiga aspek penting, yaitu terbatasnya sumber belajar yang terlalu bergantung pada buku teks siswa, rendahnya efikasi diri profesional pendidik, dan kesiapan praktis guru yang masih kurang dalam mengadopsi media pembelajaran interaktif yang berfokus pada pemecahan masalah. Situasi ini diperburuk oleh adanya kesenjangan dalam literasi teknologi digital pedagogis (*technological pedagogical content knowledge / TPACK*) di dalam kelas, di mana penggunaan alat digital sering hanya sebatas pada tingkat substitusi fungsional, bukan pada tingkat modifikasi atau redefinisi pembelajaran yang dapat mengubah [1]

Guru merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem pendidikan yang mempengaruhi kemajuan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Nadiem berpendapat bahwa para guru harus melakukan inovasi dengan kebijakan pembelajaran mandiri dalam kurikulum sebelum hal ini dapat disampaikan kepada siswa atau diterapkan. Mengingat dampak besar yang dimiliki guru terhadap proses belajar siswa dan tata kelola sekolah secara keseluruhan, mereka memiliki peran penting dalam masyarakat. Sebagai konsekuensi dari kebijakan pembelajaran mandiri, para guru diberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam merancang kurikulum dan proses pengajaran. Salah satu permasalahan yang muncul, yang juga mendorong kemunculan kebijakan pembelajaran mandiri, adalah fakta bahwa guru terlalu terbebani dengan urusan

administrasi sehingga kesulitan dalam memberikan pengajaran yang efektif kepada siswa mereka. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merumuskan kebijakan baru untuk menyelesaikan isu ini; meskipun sebelumnya fokusnya pada administrasi, kini diarahkan untuk pembelajaran yang berorientasi pada siswa dengan harapan bahwa lulusan yang dihasilkan sejalan dengan profil siswa Pancasila. Guru memiliki tanggung jawab atas kemajuan siswa mereka dalam berbagai aspek pembelajaran, tidak hanya di bidang akademik.[2]

Kondisi dilematis dalam bidang pedagogis ini mencapai tahap penting ketika dihadapkan pada kewajiban penerapan Project-Based Learning (PjBL) sebagai alat penguatan profil siswa. Para guru mengalami kesulitan dalam mengelola waktu, terutama saat mencoba menyelaraskan beban belajar proyek dengan pencapaian materi kurikuler. Kendala ini berkembang menjadi kebuntuan dalam metode pengajaran ketika guru diharuskan untuk merancang proyek yang berbeda-beda, logis, dan sesuai dengan tahap perkembangan psikologis siswa ditingkat awal sekolah dasar. Ketidakmampuan untuk membedakan desain proyek untuk fase A (terutama bagi kelas I) yang masih memerlukan instruksi sederhana, dari fase B (kelas IV) yang mulai menuntut cara berpikir abstrak-operasional, menyebabkan proyek menjadi bersifat standar dan seragam. Sebagai hasilnya, inti dari pembelajaran yang terdistribusi (*differentiated learning*) yang merupakan inti dari Kurikulum Merdeka tidak berhasil diintegrasikan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran sehari-hari.

Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan adanya ketidakselarasan teoritis yang signifikan. Keterbatasan akses terhadap bacaan yang beragam dan berkualitas, bila ditambah dengan kecenderungan guru untuk tetap menggunakan metode ceramah tradisional yang membosankan, berdampak langsung pada terciptanya suasana kelas yang tidak aktif dan tidak produktif. Lingkungan belajar yang kurang mendukung ini akhirnya menyebabkan terjadinya kelebihan kognitif pada peserta didik. Ini disebabkan oleh tuntutan untuk menyerap materi pelajaran yang berat secara teks tanpa adanya proses penyederhanaan, pengolahan kembali makna, atau metode pemahaman yang kreatif dari pengajar.[3]

Pelaksanaan pembelajaran merupakan aspek penting dalam keberhasilan Kurikulum Merdeka. Dalam praktiknya, guru masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan bahan ajar yang hanya berupa buku siswa, kurangnya kesiapan guru dalam menggunakan media pembelajaran, serta rendahnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Selain itu, penerapan pembelajaran berbasis proyek juga menjadi tantangan karena keterbatasan waktu dan kesulitan dalam menentukan proyek, terutama untuk kelas I dan IV.[4]

Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan lebih kepada guru dalam aspek pedagogis, sehingga mereka dapat merancang proses pembelajaran yang lebih tepat sasaran untuk siswa dan ambil bagian secara lebih proaktif dalam menjadi perancang pembelajaran. Meskipun begitu, pelaksanaannya masih terhambat oleh sejumlah tantangan, seperti tingginya tuntutan administratif, waktu yang terbatas, variasi dalam kewaspadaan guru dalam penguasaan teknologi dan pemahaman mengenai kurikulum, serta minimnya dukungan untuk pelatihan dan kemampuan dalam melakukan penilaian diagnostik.[5]

Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang mampu mendorong kreativitas siswa melalui berbagai pendekatan seperti saintifik, berbasis masalah, dan berbasis proyek, serta aktivitas inkuiri, observasi, hingga presentasi, sebagaimana dijelaskan oleh Mulyasa. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan akses bacaan bagi siswa serta kurangnya variasi media pembelajaran menyebabkan proses belajar menjadi kurang menarik dan cenderung monoton. Materi yang terlalu luas juga membuat siswa mengalami kebingungan. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek belum berjalan optimal karena keterbatasan waktu.

3.2 Pengaruh Otonomi Guru terhadap Kinerja Mengajar di Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan sebuah kerangka pendidikan yang memberikan keleluasaan kepada para pengajar untuk memilih teknik dan bahan ajar yang tepat dengan kebutuhan peserta didik. Proses pembelajaran dibuat lebih bervariasi melalui aktivitas intrakurikuler dan proyek untuk memperkuat Profil Pelajar Pancasila, sehingga peserta didik dapat memahami konsep secara mendalam serta mengembangkan kemampuan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kurikulum ini diluncurkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia, seperti rendahnya keterampilan membaca dan berhitung, serta adanya kesenjangan dalam kualitas pendidikan di berbagai daerah. Oleh karena itu, dilakukan perubahan dalam kurikulum untuk memperbaiki metode pembelajaran agar lebih efektif dan berfokus pada kebutuhan siswa. Dalam pelaksanaannya, guru berperan sebagai perancang, pelaksana, fasilitator, dan penilai pembelajaran. Pengajar dituntut untuk menyesuaikan cara mengajar dengan karakteristik siswa, menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek, serta mengasah keterampilan yang sesuai dengan

tuntutan Revolusi Industri 4.0, seperti literasi digital dan pemahaman data. Namun, pelaksanaan Kurikulum Merdeka masih menghadapi berbagai masalah, seperti kurangnya pelatihan bagi pengajar, kesulitan dalam penilaian, banyaknya jumlah siswa, serta ketidakmerataan kesiapan guru. Meskipun demikian, Kurikulum Merdeka diharapkan dapat menciptakan proses belajar yang lebih fleksibel, membentuk karakter siswa melalui Profil Pelajar Pancasila, dan menekankan pengembangan keterampilan alih-alih hanya mengejar nilai akademis.

Gaya Kepemimpinan Paradoks sebagai Fondasi Awal Keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka di lembaga pendidikan sangat bergantung pada cara kepala sekolah mengelola dinamika manajerial yang ada. Tiga penelitian ini menunjukkan bahwa tipe kepemimpinan yang efisien tidak bisa terjebak dalam pembagian kekuasaan antara gaya demokratis dan otokratis. Di satu aspek, pendekatan demokratis sangat penting untuk memberikan kesempatan bagi guru untuk menginisiasi ide-ide sendiri, mendengarkan masukan dari orang lain, serta menciptakan kolaborasi yang setara. Namun, di sisi lainnya, tantangan perubahan kurikulum sering kali menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan di tingkat lapangan. Di momen inilah kepemimpinan otokratis yang bersifat strategis berperan—bukan untuk mengendalikan, tetapi untuk memberikan kejelasan hukum, menegakkan standar kualitas, serta menyampaikan instruksi yang jelas saat inovasi mengalami kebuntuan. Paradoks kepemimpinan yang seimbang ini menjadi faktor utama yang menentukan seberapa besar otonomi kerja yang dapat diraih oleh guru di dalam ruang kelas[6]

Otonomi Kerja dan Urgensi Kesejahteraan Psikologis Guru Saat kepala sekolah berhasil membangun lingkungan kerja yang memberikan kebebasan, para guru memperoleh kebebasan penuh untuk merancang bahan ajar, memilih metode pengajaran, serta menetapkan kriteria evaluasi yang sesuai dengan karakteristik siswa mereka. Analisis mendalam terhadap data yang ada menunjukkan bahwa tingkat otonomi kerja guru saat ini berada dalam kategori menengah, yang menunjukkan bahwa masih banyak peluang untuk perbaikan. Hasil penting dari kajian ini menunjukkan bahwa otonomi kerja memiliki dua efek (*double-impact*). Otonomi tidak hanya berdampak langsung pada hasil pekerjaan, tetapi juga menjadi faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*) bagi para guru. Guru yang diberikan kepercayaan untuk menentukan keputusan profesional merasa memiliki kontrol atas kehidupannya, memiliki tujuan kerja yang jelas, dan tidak terjebak dalam stres yang ditimbulkan oleh birokrasi yang menghambat. Mekanisme Mediasi menuju Kinerja Unggul[7]

Aspek paling fundamental dari perpaduan ketiga penelitian ini adalah terungkapnya fungsi kesejahteraan mental sebagai variabel mediasi yang bersifat simultan dan esensial. Pemberian kebebasan dan tuntutan tinggi dari Kurikulum Merdeka tidak akan secara otomatis menghasilkan peningkatan kinerja jika kondisi mental para guru tidak diperhatikan. Kebebasan tersebut hanya akan terwujud dalam kinerja mengajar dan manajemen yang lebih baik ketika para guru berada dalam keadaan psikologis yang sehat, bahagia, dan termotivasi. Para guru yang memiliki kesejahteraan psikologis yang baik akan menunjukkan komitmen yang lebih tinggi, kemampuan kreatif yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah pembelajaran, serta hubungan interpersonal yang lebih positif dengan siswa.[8]

Hubungan Kausalitas Sirkular yang Berkelanjutan Sebagai kesimpulan, ketiga elemen ini membentuk suatu model kausalitas sirkular yang saling mendukung dalam sistem pendidikan. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dalam menyeimbangkan pengawasan dan kebebasan akan menciptakan otonomi kerja yang positif bagi para guru. Otonomi tersebut kemudian akan meningkatkan kesejahteraan mental mereka. Selanjutnya, guru yang memiliki kestabilan psikologis terbukti dapat secara signifikan meningkatkan kinerja di sekolah. Yang menarik, pencapaian kinerja yang berhasil dan kemampuan mengajar yang baik akan memberikan umpan balik positif berupa rasa pencapaian yang meningkatkan kebahagiaan serta kesehatan mental para guru. Maka dari itu, investasi dalam kesehatan mental guru dan pemberian kepercayaan profesional lewat kepemimpinan yang fleksibel menjadi kunci utama dalam keberlangsungan transformasi pendidikan saat ini.

Mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai psikologi siswa mereka. Pengajar menilai hasil belajar siswa dengan juga berfungsi sebagai penilai. Pengajar perlu memiliki beragam kemampuan untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri, termasuk keterampilan dalam perencanaan, desain, evaluasi, penelitian, pengambilan keputusan, dan manajemen. Pada setiap tahap dalam proses penyusunan kurikulum, pendidik dapat mengambil berbagai peran.

Beberapa penelitian membahas tentang pembelajaran merdeka terkait dengan fungsi pengajar. Artikel mengenai peran pengajar dalam pengembangan kurikulum pembelajaran merdeka mencakup: (1) menentukan tujuan pembelajaran spesifik yang disesuaikan dengan karakteristik lingkungan belajar, siswa, dan kondisi sekolah; (2) mengoptimalkan proses pembelajaran untuk membantu siswa mencapai kompetensi yang telah ditetapkan; (3) melaksanakan proses pembelajaran sebagai cara penerapan

kurikulum; (4) mengevaluasi tujuan dan proses pembelajaran; (5) menilai bagaimana elemen-elemen kurikuler berinteraksi saat diterapkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengajar memiliki peran[3]

Untuk mengoptimalkan hasil dari Kurikulum Merdeka, kontribusi kepala sekolah sangat penting dalam memberikan bimbingan yang mendalam, dorongan, serta menyediakan fasilitas yang mendukung. Diharapkan para guru lebih bersikap terbuka terhadap inovasi dan secara teratur mengunjungi platform Merdeka Belajar demi mengatasi ketakutan dan ketidaknyamanan terhadap hal-hal baru. Intinya, Kurikulum Merdeka saat ini masih berada pada tahap "dasar", sehingga keberlangsungan pendampingan dan kemauan guru untuk terus belajar menjadi faktor utama dalam mencapai pendidikan yang berkualitas.[9]

3.3 Kesejahteraan Psikologis Sebagai Penghubung Antara Kebebasan dan Prestasi Guru dalam Pembelajaran Mandiri

Keberhasilan perubahan dalam sistem edukasi, khususnya dalam penerapan Kurikulum Merdeka Belajar, sangat tergantung pada cara pengelolaan elemen internal pendidik di institusi pendidikan. Salah satu langkah fundamental untuk meningkatkan efektivitas pengajaran di ruang kelas adalah dengan memberikan kesempatan untuk kemandirian kerja yang cukup bagi pengajar. Dengan kebebasan secara profesional dalam merancang pembelajaran, memilih metode instruksional, serta mengatur kriteria penilaian secara mandiri, para guru dapat menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik unik siswa. Menariknya, pemberian kesempatan untuk kemandirian kerja ini terbukti memiliki dampak ganda. Melalui kebebasan dalam merancang proses belajar, memilih cara pengajaran, dan menentukan kriteria penilaian secara mandiri, para pengajar dapat menyesuaikan kurikulum dengan ciri-ciri khusus siswa. Menariknya, pemberian ruang untuk otonomi dalam pekerjaan ini terbukti memberikan dampak ganda. Selain berhubungan langsung dengan peningkatan hasil kerja, otonomi juga berfungsi sebagai faktor utama yang meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan emosional, karena para guru merasa dihargai dan memiliki kontrol sepenuhnya atas pilihan profesional mereka di lingkungan sekolah.

Mekanisme Kesejahteraan Psikologis sebagai Penghubung Utama Kinerja Walaupun memberikan kesempatan untuk otonomi dalam pekerjaan memiliki dampak signifikan, potensi ini tidak akan otomatis diterjemahkan menjadi hasil pengajaran yang unggul apabila keadaan emosional para pengajar tidak mendapatkan perhatian. Adanya kesejahteraan psikologis yang ideal—yang mencakup aspek-aspek seperti penerimaan diri, kemandirian, tujuan hidup, perkembangan pribadi, dan interaksi sosial.

Dalam Kurikulum Merdeka, kesejahteraan psikologis guru berperan sebagai penghubung antara otonomi kerja dan peningkatan kinerja guru. Otonomi yang diberikan kepada guru akan berdampak positif apabila disertai dengan rasa nyaman, penghargaan, dan rendahnya tekanan kerja. Kesejahteraan psikologis yang baik dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, dan loyalitas guru sehingga kualitas pembelajaran menjadi lebih optimal. Oleh karena itu, keberhasilan Kurikulum Merdeka bergantung pada dukungan sekolah dan kebijakan yang mampu menjaga kesehatan mental guru agar otonomi menjadi pendorong, bukan beban, dalam meningkatkan kinerjainterpersonal yang positif—terbukti bertindak sebagai variabel mediator (jembatan) yang bersifat simultan dan mutlak dalam menghubungkan tingkat otonomi dengan capaian hasil kerja [10]

Fungsi psikologis yang positif, sejahtera, dan konsisten dari seorang pendidik mempunyai dampak yang signifikan terhadap performanya di sekolah[11]. Pendidik yang matang secara mental akan menunjukkan ketahanan yang lebih unggul ketika menghadapi perubahan kurikulum yang cepat, menunjukkan loyalitas yang tinggi pada organisasi, serta dapat menciptakan suasana kelas yang aman dan menyenangkan untuk para siswa. Ketika guru merasa bahagia dengan lingkungan kerjanya dan sekaligus percaya bahwa mereka memiliki kapasitas profesional untuk mengatasi tantangan instruksional, gairah dan dedikasi mengajar mereka akan melonjak secara signifikan. Motivasi mengajar yang lahir dari pemenuhan aspek psikologis dan efikasi diri ini pada akhirnya membuat guru menjadi lebih kreatif, adaptif, serta berkomitmen penuh dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan harian mereka

Tuntutan kurikulum dan target mutu satuan pendidikan hanya dapat dipenuhi melalui kinerja guru yang unggul, di mana kinerja superior tersebut berakar kuat pada tingginya motivasi mengajar mereka. Motivasi dan kinerja yang optimal ini mustahil tercapai tanpa adanya dukungan ruang otonomi kerja yang memadai serta perhatian serius dari manajemen sekolah terhadap efikasi diri guru dan kesejahteraan psikologis mereka (e bih jauh lagi, pencapaian kinerja guru yang tuntas dan efektif pada akhirnya akan memberikan umpan balik positif berupa rasa keberhasilan (sense of accomplishment), yang berputar kembali untuk memperkuat kebahagiaan, rasa berharga, dan kesehatan mental guru secara berkelanjutan. Oleh karena itu, investasi lembaga pendidikan pada kesehatan mental dan kepercayaan profesional guru adalah pilar mutlak demi terciptanya transformasi pendidikan yang sukses.[12]

Dalam Kurikulum Merdeka, kesehatan mental pengajar menjadi elemen krusial yang mengaitkan kebebasan dalam bekerja dengan peningkatan prestasi pengajar. Fleksibilitas yang diberikan kepada guru untuk berinovasi dan menyesuaikan metode pengajaran akan menghasilkan hasil yang maksimal apabila mereka merasa aman, dihargai, dan tidak terbebani dengan tekanan yang berlebihan.

Kesehatan mental yang baik dapat menurunkan tingkat stres, meningkatkan kebahagiaan, motivasi intrinsik, kreativitas, serta komitmen pengajar yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran. Dengan demikian, kesuksesan Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada dukungan institusi pendidikan dan kebijakan yang dapat menjaga kesejahteraan mental para guru agar otonomi berfungsi sebagai pendorong kinerja, bukan sebaliknya, menjadi beban.

Hasil riset menunjukkan bahwa kesejahteraan di tempat kerja memiliki dampak besar terhadap performa guru, dengan kontribusi mencapai 33% terhadap variasi kinerja mereka. Hal ini berarti, saat kesejahteraan psikologis guru di lingkungan sekolah meningkat, maka efektivitas serta kualitas pekerjaan mereka pun ikut meningkat. Temuan ini sejalan dengan pandangan Warr (2009) yang menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan di lingkungan kerja dapat berkontribusi pada efektivitas kerja.

Namun, penelitian juga menemukan bahwa sekitar 50% guru masih menghadapi masalah dalam hal kesejahteraan di tempat kerja mereka maupun kinerja yang ditunjukkan. Situasi ini mungkin dipengaruhi oleh karakteristik individu, seperti rendahnya motivasi untuk berprestasi. Kesejahteraan psikologis yang tidak optimal pada guru bisa berdampak pada buruknya kualitas pembelajaran, sementara profesionalisme guru adalah aspek krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan potensi siswa.

Penelitian ini memiliki sejumlah limitasi, seperti waktu, tenaga, dan sumber daya yang terbatas, penggunaan kuesioner tertutup yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi psikologis guru secara mendalam, partisipasi responden yang rendah akibat kesibukan akademik, serta kelelahan responden karena banyaknya pertanyaan yang diajukan. Selain itu, riset ini belum mencakup faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kinerja guru, seperti fasilitas di sekolah dan dukungan dari lingkungan kerja.

Menyusul temuan tersebut, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru melalui pengembangan kompetensi, pelatihan, serta penciptaan suasana kerja yang mendukung. Pemerintah juga sebaiknya merumuskan kebijakan yang lebih fokus pada kesejahteraan guru, bukan hanya tuntutan administratif. Penelitian di masa mendatang disarankan untuk melibatkan penilaian dari berbagai pihak (seperti kepala sekolah, rekan kerja, dan siswa) serta mengeksplorasi faktor lain, termasuk konflik antara pekerjaan dan keluarga, demi mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja guru.[13]

3.4 Persepsi Guru terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar

Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar (SD) menghasilkan transformasi penting dalam perspektif pendidikan yang mendorong para guru untuk menyesuaikan diri dengan suasana belajar yang lebih luwes, menarik, dan berfokus pada siswa. Kurikulum ini memberi peluang bagi lembaga pendidikan untuk merancang proses pembelajaran yang cocok dengan kebutuhan serta kemampuan peserta didik, yang secara fundamental merupakan peningkatan dari kurikulum sebelumnya..[9]

Kurikulum pendidikan di Indonesia biasanya diubah lagi ketika diterapkan di sekolah atau lembaga pendidikan. Beberapa kurikulum yang berlaku di negeri ini antara lain Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006, Kurikulum 2013, dan saat ini yang digunakan adalah Kurikulum Merdeka. Saat ini, Kurikulum 2013 sedang direvisi untuk menghasilkan kurikulum baru, yaitu Kurikulum Merdeka. Untuk meningkatkan kualitas generasi muda di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat kurikulum yang baru. Kurikulum Merdeka Belajar adalah upaya yang mengambil langkah inovatif dilakukan oleh para guru dan siswa untuk meningkatkan mutu proses belajar di dalam kelas. Kurikulum Merdeka saat ini mulai diterapkan di sekolah-sekolah sesuai dengan kesiapan dan situasi masing-masing lembaga. Diharapkan para guru bisa lebih kreatif dan inovatif, bukan hanya menjadi sumber informasi satu-satunya dalam proses belajar mengajar. serta melihat siswa sebagai partisipan aktif dan pasif, sehingga pada akhirnya proses pembelajaran bisa menjadi lebih menyenangkan ..[14]

Keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada peran guru, terutama guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Guru penggerak memiliki tanggung jawab untuk menggerakkan ekosistem sekolah dan menjadi role model dalam penerapan kurikulum baru. Terdapat enam peran kunci guru penggerak dalam implementasi ini:

1. Menjadi penggerak bagi komunitas dan rekan sejawat dalam melakukan inovasi pembelajaran.
2. Berperan sebagai agen perubahan dalam peningkatan kualitas kepemimpinan siswa.
3. Menciptakan wadah diskusi dan kolaborasi antar pendidik.

4. Mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan.
5. Melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan melalui pelatihan atau seminar.
6. Menjadi motivator bagi peserta didik maupun sesama guru di kelas.[15]

Secara teoritis, pandangan guru dipengaruhi oleh hubungan antara faktor internal yang mencapai 69% (kemampuan pedagogis individu dan kesiapan berbagai model) serta faktor eksternal sebesar 31% (fasilitas dan dukungan lingkungan). Dalam aspek eksternal, posisi kepala sekolah memiliki pengaruh yang signifikan; hingga 59,4% kepala sekolah memberikan dukungan penuh yang menciptakan rasa aman secara psikologis bagi guru untuk berinovasi. Dukungan ini diperkokoh oleh keterlibatan aktif orang tua (53,1% memberi dukungan, 40,6% sangat setuju) dalam mendukung penyelenggaraan program edukasi. Dalam hal teknologi, peningkatan efektivitas Platform Merdeka Mengajar (PMM) terbukti membantu 62,5% dari para pendidik dalam mengintegrasikan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan kumpulan soal untuk asesmen diagnostik. Tingkat kemandirian para guru mulai terlihat, dengan 25% guru yang mampu membuat alat penilaian mandiri di Kelompok Kerja Guru (KKG) dan 50% guru yang sukses melakukan rekonstruksi modul P5 yang berlandaskan kearifan lokal.[1]

Namun, hambatan struktural masih ada di mana hanya 46,9% sekolah yang memiliki infrastruktur yang memadai, sedangkan 43,8% lainnya mengindikasikan kekurangan dalam fasilitas fisik dan konektivitas internet. Menghadapi masalah infrastruktur ini, muncul fenomena inovasi lokal di mana para guru memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan mereka sebagai alat untuk pembelajaran praktis agar suasana kelas tetap menarik (78,1% guru sering mengubah metode pembelajaran).

Pembelajaran yang berfokus pada praktik dapat meningkatkan minat siswa, namun terdapat tantangan dalam mengonversi pengalaman yang didapat menjadi pemahaman teoretis tertulis karena variasi dalam kemampuan membaca setiap siswa. Oleh karena itu, posisi guru berubah menjadi pendukung yang mesti mampu merancang pembelajaran yang fleksibel melalui modul, lembar kerja, dan penilaian yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Keberhasilan Kurikulum Merdeka sangat tergantung pada kerja sama antara kepemimpinan kepala sekolah, inovasi guru, serta pemanfaatan penilaian yang sesuai seperti AKM untuk menilai pencapaian kompetensi siswa.[16]

Implementasi Kurikulum Merdeka masih mengalami sejumlah hambatan, seperti sistem penilaian yang tetap terfokus pada ujian kognitif dan memaksa guru untuk menerapkan metode mengajar yang mengutamakan tes, sehingga pembelajaran kontekstual tidak berjalan dengan baik. Di samping itu, terdapat perbedaan kemampuan antara guru yang baru dan yang sudah berpengalaman dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum.

Tantangan tambahan muncul dari variasi kemampuan siswa, kerumitan dalam menerapkan pembelajaran yang berbeda bagi siswa dengan kebutuhan khusus, rendahnya tingkat dukungan dari orangtua, serta kekurangan infrastruktur seperti akses internet yang menghalangi pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM).

Untuk menanggulangi isu-isu tersebut, pihak madrasah melakukan penguatan keterampilan guru melalui forum refleksi, kerjasama komunikasi, dan pelatihan In House Training (IHT). Upaya ini bertujuan agar guru bisa bertransformasi menjadi fasilitator pembelajaran yang kompeten dalam merancang modul ajar, mengelola proyek P5, sekaligus meningkatkan kemampuan berpikir kritis, empati, dan penyelesaian masalah siswa.[17]

3.5 Otonomi Pedagogis Guru dalam Kurikulum Merdeka: Peluang dan Tantangan

Kurikulum Merdeka dirancang sebagai suatu kerangka pembelajaran yang menawarkan peluang eksplorasi di dalam kurikulum dengan cara yang fleksibel melalui pengoptimalan materi dasar. Rancangan ini bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup bagi siswa dalam membangun pemikiran serta keterampilan mereka secara mandiri. Dengan adanya fleksibilitas dalam metode pengajaran, para pengajar dapat menyesuaikan aktivitas belajar sesuai dengan karakteristik, minat, dan kebutuhan unik siswa. Selain dari kerangka intrakurikuler, Kurikulum ini menggabungkan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) sebagai kegiatan ko-kurikuler yang tidak berfokus pada aspek akademis, melainkan pada penguatan karakter kebangsaan tanpa terikat pada pencapaian materi pembelajaran tertentu. Melalui perubahan ini, posisi guru beralih dari sekadar penyampai informasi satu arah menjadi pendamping dan fasilitator yang memberikan dorongan untuk meningkatkan kesadaran diri dan kemandirian dalam pengambilan keputusan bagi para peserta didik [18]

Kurikulum Merdeka muncul sebagai solusi untuk merespon permasalahan pendidikan di abad ke-21 dengan memberikan kebebasan belajar serta otonomi yang lebih kepada para pengajar dalam merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kebijakan ini memfokuskan pada pembelajaran

yang terpersonalisasi serta evaluasi yang lebih mengutamakan proses perkembangan pembelajaran murid, bukan hanya sekedar pencapaian materi. Namun, dalam penerapannya, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya jurang antara cita-cita kebijakan dan situasi yang terjadi. Para pendidik, sebagai elemen utama, tidak hanya dituntut untuk memahami isi dari kurikulum yang baru, tetapi juga diharuskan melakukan transformasi mendasar dalam keyakinan dan praktik pengajaran yang telah lama ada.

Tantangan Multidimensional Guru Pelaksanaan Kurikulum Merdeka menghadapi masalah yang rumit dengan tiga aspek utama:

1. Dimensi Kognitif-Pedagogis

Para pendidik masih mengalami tantangan dalam mengerti konsep-konsep dasar dari Kurikulum Merdeka, termasuk penyusunan Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), serta penerapan pembelajaran yang berbeda-beda dan penilaian formatif yang asli

2. Dimensi Struktural

Penerapan Kurikulum Merdeka masih terganggu oleh adanya dua alur kurikulum, yaitu Kurikulum 2013, yang membuat beban kerja para guru semakin berat. Di samping itu, pelatihan untuk para guru dinilai belum memadai karena masih banyak mengandalkan metode pengajaran yang kurang aplikatif

3. Dimensi Psikologis dan Strategi Adaptasi

Beban administratif dan ketidakpastian terkait kebijakan dapat berujung pada kelelahan dan penolakan di kalangan guru. Sebagai solusi, para guru memperkuat kerjasama dengan membentuk komunitas belajar, seperti Kelompok Kerja Guru (KKG), yang berfungsi sebagai tempat bertukar pengalaman dan mengasah kemampuan bersama-sama

4. KESIMPULAN

Implementasi Kurikulum Merdeka memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pengajar untuk meningkatkan kebebasan profesional dalam merancang, melaksanakan, dan menilai proses belajar sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, serta kemampuan siswa. Kebebasan ini menjadi elemen kunci dalam meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemampuan guru untuk beradaptasi dengan tuntutan pendidikan di abad ke-21. Pengajar tidak hanya sekedar berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu menciptakan pengalaman belajar yang relevan, kontekstual, dan berfokus pada siswa.

Namun, suksesnya implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya bergantung pada pembelajaran berian otonomi kepada pengajar, tetapi juga pada kesiapan dalam kompetensi pengajaran, kemampuan dalam literasi digital, pengertian tentang konsep Kurikulum Merdeka, serta dukungan dari lingkungan sekolah. Berbagai hambatan masih terlihat dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan infrastruktur dan sumber belajar, perbedaan kemampuan guru dalam penggunaan teknologi, beban administrasi yang tinggi, kesulitan dalam menerapkan pembelajaran yang berbeda-beda dan Pembelajaran Berbasis Proyek (PJBL), serta ketidakmerataan dalam akses pelatihan profesional.

Selain itu, Kesehatan psikologis pendidik memainkan peranan krusial dalam menghubungkan otonomi kerja dengan peningkatan hasil mengajar. Guru yang merasakan penghargaan, mendapatkan dukungan dari pimpinan sekolah, beroperasi dalam lingkungan kerja yang saling membantu, serta berada dalam kondisi mental yang positif akan lebih terdorong, inovatif, dan dapat menghadirkan pengajaran yang berkualitas. Oleh karena itu, perubahan pendidikan melalui Kurikulum Merdeka memerlukan kerjasama antara guru, kepala sekolah, pemerintah, serta komunitas pendidikan melalui penyediaan pelatihan yang berkelanjutan, penguatan budaya kolaboratif, peningkatan sarana, dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan para guru.

Dengan demikian, otonomi guru dalam Kurikulum Merdeka dapat berfungsi sebagai penggerak utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan jika disertai dengan pengembangan kemampuan, dukungan dari lembaga, serta perhatian terhadap kesejahteraan mental guru. Pelaksanaan yang terus-menerus dan fleksibel akan mendukung tercapainya tujuan Kurikulum Merdeka, yaitu menciptakan pengalaman belajar yang lebih bebas, relevan, dan mampu membentuk siswa yang memiliki kompetensi serta karakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

REFERENCES

- [1] M. I. Jayanti and N. Annafi, “Persepsi Guru Terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Dasar,” vol. 7, no. 1, pp. 57–69, 2024.
- [2] I. G. D. Sanjiartha, “Makna Kurikulum Merdeka bagi Guru dan Siswa : Pendekatan Fenomenologis,” vol. 16, no. 2, pp. 119–126, 2025.
- [3] F. F. Saputro, Z. Arifin, P. Islam, and U. Muhammadiyah, “Peran Guru dalam Pengembangan Kurikulum Merdeka,” vol. 1, no. 2, pp. 16–24, 2023.
- [4] A. Tullah, L. Mufida, and S. B. Kurniawan, “Analisis guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka tahap mandiri berubah di sekolah dasar,” no. 449, pp. 30–35.
- [5] H. A. Manusia, “No Title,” pp. 1–19.
- [6] W. Bachtiyar and K. Jember, “PARADOKS KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS VS OTOKRATIS DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA : DAMPAKNYA TERHADAP INISIATIF MANDIRI GURU PARADOKS KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS VS OTOKRATIS DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA : DAMPAKNYA TERHADAP INISIATIF MANDIRI GURU,” vol. 4, no. 1, 2026.
- [7] S. Darmayanti, S. Bahri, U. Almuslim, K. K. Sekolah, K. Manajerial, and K. Guru, “Pengaruh Kemampuan Manajerial , Kepemimpinan Kepala Sekolah , dan Budaya Organisasi Sekolah Terhadap Kinerja Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di MIN se-Kabupaten Aceh Tenggara The Influence of Managerial Ability , Principal Leadership , and School Organisational Culture on Teacher Performance in the Implementation of Merdeka Belajar Curriculum at MIN in Southeast Aceh District,” vol. 4, no. 3, pp. 1875–1886, 2024.
- [8] K. Psikologis *et al.*, vol. 6, no. 1, pp. 61–72, 2024.
- [9] R. Witorsa, “Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka pada Guru-guru Sekolah Dasar Negeri 6 Selatpanjang Selatan,” vol. 4, no. 1, pp. 178–184.
- [10] S. Arinda, R. Kamal, Y. I. Kristiyana, S. Zulaikha, and M. Takdir, “Pengaruh Kesejahteraan Psikologis terhadap Kinerja Guru dalam Konteks Tenaga Kependidikan di Sekolah,” vol. 4, no. 1, pp. 766–781, 2025.
- [11] M. Afroka, “Persepsi Guru Terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia,” vol. 1, no. 2, pp. 1–12, 2025.
- [12] J. I. Kependidikan, “DIDAKTIK GLOBAL,” 2026.
- [13] F. T. Ummi, D. Rustiana, F. P. Psikologi, U. N. Jakarta, F. P. Psikologi, and U. N. Jakarta, “ASPEK-ASPEK PSIKOLOGIS YANG BERPENGARUH TERHADAP,” vol. 7, pp. 100–108, 2018.
- [14] “3 1,2,3,” vol. 09, no. September, 2024.
- [15] A. J. Ilmiah *et al.*, vol. 7, no. 1, pp. 330–345, 2023, doi: 10.35931/am.v7i1.1.
- [16] P. Mata *et al.*, “Persepsi Guru Terkait Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar,” vol. 6, no. 4, pp. 1597–1608, 2023, doi: 10.31949/jee.v6i4.7132.
- [17] A. Muzharifah, “Persepsi Guru Terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah Walisongo Kranji 01 Kedungwuni,” vol. 2, no. 2, 2023.
- [18] M. R. Arviansyah, A. Shagena, M. R. Arviansyah, and A. Shagena, “Tantangan dan Peran Dari Guru dalam Kurikulum Merdeka Belajar,” vol. 15, no. 1, pp. 219–232, 2022.
- [19] L. S. Sihite, D. S. Hasibuan, N. Mardiah, A. M. Jadhi, and R. Boot, “Dinamika Dan Strategi Adaptasi Guru Dalam Menghadapi Tantangan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi,” vol. 5, no. 3, pp. 150–160, 2026.
- [20] M. Habibullah, F. Delima, and I. Wati, “Tantangan dan Peran Guru dalam Kurikulum Merdeka Belajar,” pp. 140–148, 2024.